. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



# I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018). Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan dibuatnya LAKIN ini agar pengambilan keputusan di masa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Untuk menilai efektif dan efisien sebuah LAKIN, penulis menggunakan metode *Value for Money* dengan menggunakan standar kriteria pengukuran persentase penilaian dari Metode Penilaian Kuantitatif (Prasetyo, dkk:110). Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan ada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efesiensi, dan efektivitas. Pengukuran dengan rasio ekonomi dilakukan dengan cara membandingkan *input* rencana dengan *input* realisasi. Selain itu rasio efesiensi dilakukan dengan cara membandingkan nilai kinerja *output* dengan nilai kinerja *outcome* 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal adalah salah satu organisasi sektor publik, Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Oleh karena itu setiap tahunnya KPPN Tegal membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN). Tujuan penyusunan LAKIN pada KPPN Tegal ini adalah untuk mengetahui hasil atas pelaksanaan program kegiatan beserta langkah—langkah yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

per pel me me al University Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Permasalahan yang paling sering ditemui dalam sebuah LAKIN adalah ditemukannya realisasi anggaran serta pencapaiannya yang tidak selaras dalam sebuah program kegiatan yang tidak jelas keterangannya ataupun kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan suatu kondisi sehingga sering kali LAKIN terkadang tidak selaras dengan Renstra yang disusun oleh pemerintah. Namun, dalam LAKIN 2021 disebutkan oleh KPPN Tegal bahwa secara keseluruhan seluruhnya telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi). Selain itu, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-172/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang penetapan Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Tegal menjadi salah satu yang ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. Sebagai KPPN Percontohan tentunya KPPN Tegal memiliki kinerja anggaran, realisasi dan output yang baik. Dengan adanya status memenuhi target pada LAKIN 2021 dan penetapan KPPN Tegal menjadi salah satu KPPN Percontohan hal ini yang menarik perhatian penulis untuk membandingkan kinerja LAKIN pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2019, serta menguraikan mengapa LAKIN 2019 s.d. 2021 dikategorikan ekonomis, efisien, danefektif. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin menguji LAKIN KPPN Tegal dengan menggunakan analisis Value for Money. Oleh karena itu, penulis akan membahas dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul "Analisis Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal".

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah tercantum, maka topik yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Analisis *Value for Money* untuk Mengukur Kinerja KPPN Tegal Tahun 2019-2021. Maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penyusunan LAKIN di KPPN Tegal?
- 2. Bagaimana rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas pada LAKIN di KPPN Tegal menggunakan metode *Value for Money*?
- 3. Bagaimana evaluasi kinerja LAKIN di KPPN Tegal berdasarkan analisis *Value for Money*?

### 1.3 Tujuan

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk:

- 1. Menjelaskan proses penyusunan LAKIN di KPPN Tegal.
- 2. Menjelaskan analisis ekonomis, efisiensi, dan efektivitas LAKIN di KPPN Tegal menggunakan metode *Value for Money*.
- 3. Menguraikan hasil evaluasi dan penilaian kinerja LAKIN di KPPN Tegal.

### 1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Bagi Penulis
  - Untuk mengetahui proses penyusunan LAKIN, analisis *Value for Money* pada LAKIN KPPN Tegal, serta hasil analisis *Value for Money*.
- 2. Bagi Pembaca





Untuk memperluas wawasan dan sebagai sarana tambahan ilmu pengetahuan tentang analisis Value for Money.

- 3. Bagi Perusahaan Untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait efisien dan efektivitas LAKIN KPPN Tegal.
- 4. Bagi Institut Pertanian Bogor Untuk dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi Mahasiswa khususnya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.



Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)